

Konferensi Nasional Sejarah VIII
Jakarta, 14-16 November 2006

LAUT, SUNGAI DAN PERKEMBANGAN PERADABAN

Dunia Maritim Asia Tenggara, Indonesia dan Metodologi Strukturis

Susanto Zuhdi
Universitas Indonesia

'Lauso la mare e tente 'n terro' ('Praise the sea and stay on land')
Fernand Braudel¹

'We need to recognize the interpretation of global, macro-regional, national, network and local scales, while at the same understanding that scales not nested in a neat, hierarchy, but seen to coexist and interpenetrate in a tangled and bewildering way'
Dato' Prof. Dr. Shaharil Talib²

Ketika diajukan pertanyaan mas kawin untuk melamar gadis pujaannya, pemuda miskin menjawab "Pak, saya masih muda; karena itu belum sempat mengumpulkan kekayaan. Tetapi saya memiliki kolam ikan yang sangat luas dengan jumlah ikan yang tak terhitung banyaknya, yang tak akan pernah habis dipanen. Kolam itu merupakan pusaka dari nenek moyang saya".³

Pandangan bahwa laut adalah kehidupan, tempat banyak orang bergantung kiranya sulit dipungkiri. Dalam kaitan dengan jawaban pemuda itu, laut adalah sumber kehidupan. Dilihat dari dimensi temporal kehidupan itu sendiri adalah sejarah. Dalam

¹ Fernand Braudel, *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*, Berkeley, Univ. of California Press.1995 I:17

² Shaharil Talib, "Reflection on Malaysian Social Sciences and Humanities: An Historian's Perspective" paper on International Workshop on Reflection Sciences and Humanities in Southeast Asia, Jakarta, LIPI, 22-23 November 2005.

³ Folklore dari Minahasa, dikutip dari A.B. Lopian, "Perebutan Samudera: Laut Sulawesi pada Abad XVI dan XVII", *Majalah Prisma*, No. 11, 1984:28.

konteks inilah menjadi relevan dengan ungkapan puitis ‘A Sea of history – a history of the Seas’.⁴ Metafora itu melukiskan kehidupan manusia di muka bumi yang nyatanya sebagian besar wilayahnya adalah laut. Laut sejarah kalau demikian boleh disebut sebagai “laut kehidupan manusia” wahana berlangsungnya peradaban maritim. Akan tetapi sejarah tentang laut masih minim dikerjakan, apalagi okeh sejarawan Indonesia.

Seiring dengan globalisasi, pandangan tentang bumi kita pun berubah. Kalau dulu bumi adalah bulat, kini bumi adalah rata (*The World is flat*).⁵ Dengan perkembangan teknologi informasi kini hampir tak bagian di muka bumi yang luput dari jangkauan informasi yang begitu cepat. Dengan logika penyebaran informasi tak mengindahkan batas dan tak mungkin juga diatasi, maka bagaimana dengan penegakkan sebuah negara baik dalam kedaulatan teritorial maupun kebanggaan (kebudayaan) nasionalnya. Atau dengan katan lain soal identitas bangsa.

Dalam perspektif historis, globalisasi semacam itu bukan baru terjadi sekarang. Pertemuan budaya (*cultural encounters*) dengan Barat telah berlangsung seperti telah diperlihatkan ‘dunia’ Asia Tenggara khususnya dalam abad ke-15 sampai ke-17.⁶ Sebagai konsekuensi dari perjumpaan kebudayaan itulah yang melahirkan pola peradaban Asia Tenggara terutama yang digerakkan oleh aktivitas perdagangan dan disebut sebagai ‘masa modern awal’.⁷ Dikatakan “modern awal” karena dalam periode itulah Asia Tenggara masuk ke dalam proses modernisasi, kemajuan dan globalisasi dengan karakteristik kapitalisme Barat.

Anthony Reid mengangkat tema perdagangan dan kapitalisme untuk mengkaji Asia Tenggara periode tersebut, dengan kerangka untuk menulis “Sejarah Utuh” (Total History). Akhir dari periode itu adalah tegaknya hegemoni niaga Belanda di Asia Tenggara. Logika kausalitas historisnya adalah mengapa Asia Tenggara gagal menghadapi perniagaan Belanda (VOC). Kerangka penjelasan Reid terhadap masalah itu

⁴ “A Sea of Histories, a History of the Seas” An interview with Adrian.B. Lopian, by Hendrik E. Niemeijer, *Itinerario*, volume xxvii (2004) number 1 Leiden, Grafaria 2004:7-15.

⁵ Thomas L. Friedman, *The World is Flat: A Brief History of The Twenty-First Century*. New York, Farrar, Straus and Giroux, 2006 (first edition 2005)

⁶ Periode ‘modern awal’ masih diperdebatkan. Ada pendapat bisa ditarik ke atas sampai abad ke-18 bahkan sampai abad ke-19. (lihat Kata Pengantar R.Z. Leirissa dalam Anthony Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, terj. (Jakarta, LP3ES, 2004)

⁷ Penyebutan ini semula ‘kurun niaga’ (*the age of commerce*) seperti dalam dua buku Anthony Reid. Sedangkan dalam bukunya yang ketiga diterjemahkan (2004) secara eksplisit ‘modern awal’ (Asia Tenggara).

adalah dengan mencari sumber yang menggambarkan perubahan-perubahan yang paling mempengaruhi penduduk secara luas, dibanding dengan kepada para penguasa seperti sudah banyak ditulis sebelumnya.⁸

Karya-karya Reid membuka cakrawala bagi peneliti sejarah maritim Indonesia untuk mengamati ‘dunia maritim’ lain sebagai sistem laut secara komprehensif. Dalam dunia maritim abad ke XIX misalnya, A.B. Lopian mengembangkannya dengan menunjukkan adanya sub-sub sistem kelautan di Indonesia, yang pada prinsipnya juga merupakan sistem-sistem laut tersendiri.⁹ Laut Sulawesi adalah fokus kajian A.B. Lopian sebagai disertasi.¹⁰

Dalam hal manfaat praktis memang, kajian sejarah maritim dapat memberi wawasan bagi penguatan jatidiri bangsa. Contoh yang paling jelas adalah NKRI dengan “Wawasan Nusantara”nya. Tentang kajian integrasi ekonomi nasional dari perspektif sejarah maritim telah dilakukan Singgih Tri Sulistyono melalui disertasinya yang dipertahankan di Universitas Leiden. Ia menulis mengenai peran Laut Jawa sebagai jaringan yang membentuk pola-pola perkembangan pelayaran dan perdagangan antarwilayah yang membentuk integrasi ekonomi nasional Indonesia.¹¹

Meskipun di satu sisi memberikan manfaat kebanggaan, kajian sejarah maritim juga berimplikasi pada permasalahan kedaulatan sebagai negara dengan teritorial laut luas seperti Indonesia. Dengan berdirinya negara-negara bangsa di Asia tenggara, penegakan kedaulatan wilayah menjadi permasalahan perbatasan antar negara tetangga.¹²

MASUKNYA ASIA TENGGARA KE DALAM SISTEM DUNIA MODERN

Interaksi masyarakat Asia Tenggara dengan kebudayaan asing merupakan konsekuensi dari posisinya yang strategisnya di sepanjang jalur utama maritim yang menghubungkan Timur dan Barat sudah berlangsung sejak milenia pertama. Bukan hanya tempat persinggahan untuk berbagai produk Timur dan Barat, juga tempat pertemuan berbagai

⁸ Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga*, terj. (1992). Prakata:xxx

⁹ A.B. Lopian “Sejarah Nusantara Sejarah Hahari”, Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa UI, 1992.

¹⁰ A.B. Lopian, *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut :Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX.*, Disertasi Universitas Gadjah Mada, 1987.

¹¹ Singgih Tri Sulistyono, *The Java Sea Network: Patterns in the Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s.* (Leiden, 2003)

¹² Sebagai contoh dapat disebut hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari peta wilayah Indonesia. SDA laut seperti blok Ambalat yang kaya sumber minyak, merupakan isu semacam itu juga.

pedagang yang datang dari arah itu.¹³ Kenneth R. Hall bahkan menunjukkan sudah terbentuk pusat-pusat kekuasaan klasik yang muncul antara abad pertama dan awal abad ke-14. Dua bentuk negara klasik yang dijelaskan adalah: negara-negara persungai/pesisir yaitu kepulauan Indonesia, Semenanjung Malaya, dan Filipina; negara-negara persawahan di dataran rendah di daratan Asia Tenggara seperti Burma, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam, serta Jawa.¹⁴

Kegagalan Asia Tenggara menghadapi hegemoni kapitalisme dalam abad ke-9 memasukkan wilayah ini ke dalam orbit ekonomi dunia. Terjadilah perubahan posisi, dari ‘pusat’ menjadi ‘pinggiran’. Sebutan atau istilah yang berkembang ini sejalan dengan pengalaman sejarah kolonialisme-imperialisme dunia. Interkoneksi antara Timur dan Barat dalam konteks global menjadi jelas dalam abad imperialisme (the age of imperialism). Dalam konteks itu Barat berarti maju (progress) dan karenanya memperoleh keuntungan (benefit). Dalam analisis Hobson dan V.I. Lenin ketimpangan structural itu diciptakan oleh penggabungan secara paksa dan wilayah lainnya ke dalam orbit ekonomi Eropa. Keduanya melihat apa yang terjadi adalah lebih merupakan proses memusatnya kemakmuran Asia ke Eropa daripada untuk Asia sendiri. Itulah yang disebut “colonial drain”.

Pada masa pasca-kolonial, beberapa pakar mencoba mengemukakan teori-teori untuk menerangkan matarantai structural antara kemajuan Barat dan non-Barat yang miskin. Proses itu bukan sebagai akibat keterbelakangan melainkan merupakan konsekuensi langsung dari yang dinamakan *colonial drain*. Selain Andre Gunder Frank (1966) suatu penjelasan yang paling berpengaruh datang dari Immanuel Wallerstein.¹⁵ Ia memberi rumusan bentuk paling awal dari system dunia—dalam hal ini artinya bukan “sedunia atau global”, tetapi mengacu pada lingkungan luas interkoneksi ekonomi. Wallerstein mencatat asal-usul sistem modern munculnya kapitalisme di Eropa dalam abad ke-16, suatu proses penyatuan peta bumi sepenuhnya. Seperti pendahulunya, Wallerstein juga mengatakan sistem dunia modern terbagi menjadi yang inti” (core) yang

¹³ M.A.P Meilink-Roelofs, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1962:13.

¹⁴ Hall, Kenneth R, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*, Honolulu, Univ Hawaii Press, 1985.

¹⁵ Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York, academic press, 1974.

mengendalikan ekonomi politik dan mendikte kerangka produksi dan distribusi dari *periphery*, dari tempat mana sumber daya mengalir ke pusat; jadi wilayah-wilayah baru terkait dan hampir tak mungkin terelakkan menjadi subordinasi sejak awal.¹⁶

Dunia maritim Asia Tenggara sejak itu dihadapkan pada dunia kapitalisme dan imperialisme semakin konkret membatasi ruang gerak kehidupannya. Keberlanjutan jaringan pelayaran orang Austronesia dengan dunia maritimnya kini goyah, kalau pun tidak dikatakan berantakan. Dapat dikatakan ‘dunia bahari’ yang identik dengan ‘Dunia Melayu’ menjadi goyah. Padahal dengan akar budaya Austronesia orang Melayu adalah mereka yang mampu berlayar ke barat sampai Madagaskar dan ke timur ke Melanesia. Nenek moyang di kepulauan ini “tidak datang dari mana tetapi pergi ke mana-mana”. Teori itu didasarkan pada penyebaran bahasa Austronesia.¹⁷

Perubahan semakin tegas yang memisahkan wilayah niaga Asia Tenggara adalah dengan semakin kuatnya pengaruh kolonialisme-kapitalisme Belanda dan Inggris dalam abad ke-19. Persaingan mereka di wilayah jajahannya telah berakibat pada permasalahan batas-batas wilayah. Masalah itu semakin diperparah karena ada kaitan erat antara wilayah perbatasan dengan aksi penyelundupan barang atau perdagangan gelap. Tampaknya Hindia Belanda lebih khawatir tentang daerah perbatasannya daripada Inggris. Itu dapat dipahami karena Belanda cenderung menjalankan ekonomi yang monopolistik dan kelanjutan untuk menghadapi perlawanan politik pribumi terutama di sepanjang perbatasan.¹⁸

Salah satu masalah dekolonisasi di Asia Tenggara Perubahan dimaksud adalah akibat praktik kolonialisme dan kapitalisme yang semakin bersaing menetapkan wilayah jajahannya sehingga melahirkan masalah perbatasan. Itu dilakukan dengan rekonseptualisasi dunia Asia Tenggara yang (tadinya) cair ke dalam suatu kartografi baru yang tegas mengenai wilayah perbatasan yang mencerminkan persaingan kuat kolonial

¹⁶ Norman G. Owen, ed. *The Emergence of Modern Southeast Asia a New History*. Honolulu, Univ. of Hawaii Press, 2005:161-162.

¹⁷ Daud Tanudirdjo, “The Dispersal of Austronesian’s Speaking People and The Ethnogenesis of Indonesia People”, paper International Symposium, The Dispersal of the Austronesians and the DEthnogenesis of People in Indonesia Archipelago, LIPI, Solo, June 28th – July 1st, 2005.

¹⁸ Eric Tagliacozza, *Secret Traders, Poulos Borders, Smuggling and States Along a Southeast Asian Frontier, 1815-1915*. New Haven & London, Yale Univ Press, 2005.

di abad ke-19 dan ke-20. Hal itu telah mereduksi dunia multi skala melalui historiografi dan geografi modern, suatu dunia yang diikat oleh negara kolonial.¹⁹

Persaingan daerah jajahan antara Inggris dan Belanda di Asia Tenggara berakibat pada hubungan kedua bangsa, baik dalam masalah geografi dan budaya sampai sekarang. Itu berpengaruh juga dalam penulisan sejarah (historiografi). Prof. Shaharil Talib menggambarkan ‘Dunia Melayu’ yang mencakup wilayah budaya dengan karakteristik bahari kini hancur. Pemetaan daerah jajahan Belanda dan Inggris menjadi ‘spatio-temporal’ yang tegas, yang kemudian menjadi obyek dan prioritas geopolitik dan geoekonomi baru pasca Perang (Dunia II) yang didominasi Amerika Serikat terutama untuk kepentingan globalismenya.²⁰ Dalam kondisi seperti ini, Shaharil menunjukkan bahwa tatanan dunia sudah berubah karena globalisasi yang berdampak luas secara keruangan dan dunia pandangan. Ia melihat telah terjadi lapis-lapis hirarkis yang memperlihatkan aspek keruangan itu: dari global, makro-regional, nasional, dan skala lokal.

Sebagai akibatnya kehidupan masyarakat di Asia Tenggara semakin terpisah dari untaian tamaddun Melayu yang bermarwah. Substansi peradaban dengan menempatkan marwah kemanusiaan menjadi hilang. Tamaddun ‘Dunia Melayu’ khususnya Indonesia-Riau tidak lagi menjadi acuan yang membanggakan. Simpul-simpulnya kini telah terurai hampir tak membekas lagi sebagai faktor perekat budaya Melayu.

INDONESIA : Sudut Pandang Bahari

Indonesia adalah bagian, dan sangat jelas sebagai kontributor utama bagi ‘Dunia Melayu’ yang terus terkoyak dan hampir yak berdaya menghadapi terpaan pembangunan kapitalistik. Lalu menjadi pertanyaan kemana gaung ungkapan ‘Tak Melayu hilang di bumi’ yang sering dikumandangkan dalam berbagai pertemuan di negeri-negeri Melayu (Indonesia). Barangkali sudah tinggal retorika saja, sudah kehilangan tuahnya. Melayu dengan peradaban maritimnya seperti telah diperlihatkan kehidupan Selat Makala.

Dunia Melayu yang erat dengan tradisi maritim, khususnya suatu peradaban Selat (Malaka dan sekitar Kepulauan Riau) kini di Indonesia-Riau tidak lagi berbicara. Itu

¹⁹ Shaharil Talib, “ Reflection on Malaysian Social Sciences and Humanities: An Historian’s Perspective”, paper Seminar 2005 :14.

²⁰ Shaharil Talib, *ibid*

karena mereka telah “membelakangi selat”.²¹ Padahal asal muasal Melayu dari Bukitseguntang, Bangka, Bintan, Johor, ke Melaka. Hubungan ulu-ilir pun terputus oleh karena eksploitasi besar-besaran dengan penebangan hutan dan limbah yang tak tertampung dan ditangani pengelolaan dan pengolahannya. Akibatnya berita tentang banjir pada musim penghujan menjadi suguhan biasa di negeri. Anehnya itu tidak menyadarkan kita untuk berbuat lebih baik untuk mengatasinya secara tuntas.

Ungkapan “*Jales Viva Jayamahe*” (‘di laut kita jaya’) merupakan slogan yang seharusnya diwujudkan dalam kenyataan. Sejauhmana kemampuan armada laut bangsa ini dalam mengawal kedaulatan lautnya. Berapa banyak penyelundupan di laut dan pencurian ikan oleh nelayan asing tidak bisa diatasi secara tuntas. Dilihat dari besarnya jumlah pulau NKRI, ternyata masih ribuan yang belum bernama dan teridentifikasi secara akurat potensinya. Bagaimana harus disikapi dengan sebuah berita tentang “nasib Warga Pulau terluar”, ketika Camat Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Baharuddin mengungkapkan: “ terus terang, saya atas nama masyarakat Kecamatan Pulau Laut merasa sangat bahagia karena selama hidup kami, baru kali ini kami benar-benar merasakan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini merupakan sejarah bagi masyarakat Pulau Laut”.²²

Begitu lah dengan NKRI yang bertegak kini. Terdapat dua karakter pola negara di Indonesia; negara laut-persungai dan negara persawahan dataran rendah. Pola pertama yang mewariskan kehidupan agraris dan kedua maritim. Oleh karena itulah “Tanah Air” adalah konsep yang menyatukan wilayah negara. Risalah sidang BPUPKI tahun 1945 merupakan bahan renungan yang dalam tentang proses konseptualisasi Tanah Air.²³

Akan tetapi yang terjadi adalah belum munculnya sudut pandang bahari dalam memandang kondisi Tanah Air itu sendiri. Penyebutan “pulau terluar” yang merupakan terjemahan dari “*outermost island*” di dalam artikel UNCLOS, tidak harus letterlijk dalam pengertian sejarah bangsa ini. Kekhawatiran akan masih tersisanya warisan cara pandang ‘negara konsentrik’,²⁴ maka sebutan ‘terluar’ bersifat konotatif juga. Pembagian wilayah atas prinsip pengaruh kekuasaan yang bertolak dari kraton, secara melingkar

²¹ Yusmar Yusuf, *Melayu Juwita: Renjis Riau Sebingkai Perisa*, Jakarta, Penerbit Wedatama, 2006.

²² *Kompas*, 20 Oktober 2006:33.

²³ Susanto Zuhdi, “Perspektif Tanah-Air Dalam Sejarah Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2006.

²⁴ Denys Lombard, *Nusa-Jawa Silang Budaya*, jilid 3 (terj, Gramedia, 1995)

bergerak semakin menjauh. Bermula dari kraton, kutagara, mancanegara, pasisir dan tanah sabrang. Wilayah terkhir ini adalah artinya ‘luar Jawa’. Pemerintah colonial Belanda pun menyebut outer Java. Selain itu ada istilah *buitengewesten*, wilayah luar (artinya tetap sama Luar Jawa).

Itulah sebabnya setelah melalui pencarian istilah yang memerlukan proses, penulis menyebut ‘pulau terluar’ dengan ‘pulau terdepan’.²⁵ Itu bukan berarti kita menolak istilah yang telah disebut UNCLOS. Sebutan ‘terdepan’ karena pulau yang sebanyak 92 itu mengisi ‘halaman’ depan “rumah negara” bahari Indonesia. Dalam kamus KBBI arti “halaman” adalah pekarangan atau tanah di depan rumah (KBBI 1995:336). Pun yang dimaksud depan adalah utara, arah datangnya serangan musuh sebut saja; pasukan Khubilai Khan (abaqd ke-13), dan tentara Jepang (1941-1942).

Sementara itu dihadapkan pada berbagai bencana alam dan rusaknya lingkungan di Tanah-Air belakangan ini suatu diperlukan *road mapping* untuk melacak ‘pulau-pulau sejarah’ yang terabaikan (*neglected islands of history*). Penduduk di Kepulauan ini sesungguhnya memiliki banyak pengetahuan lokal sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan alamnya. *Iebeuna* (Aceh) dan *Seumong* (Pulau Simeleu) sebagai contoh yang dapat digunakan untuk mengganti istilah *tsunami*. *Somahe kai kehage* yang bermakna “gelombang adalah tantangan kehidupan” merupakan ungkapan masyarakat maritim di kepulauan Sangir-Talaud. Tentu masih banyak pengetahuan lokal semacam itu di wilayah Nusantara.

Sampai saat ini masih ribuan jumlah pulau yang belum bernama dan teridentifikasi dengan baik. Itu artinya masih banyak sejarah pulau yang belum dikaji. Dengan demikian masih terbuka luas bagi kajian sejarah maritim mengenai ‘pulau sejarah’ yang juga terabaikan (*the history of neglected islands*).²⁶ Suatu kajian Alex J. Ulaen patut diberikan tempat dalam konteks ini. Berlatar belakang antropologi yang kini banyak berkecimpung di bidang sejarah, ia mengungkap pulau-pulau di kepulauan

²⁵ Susanto Zuhdi, “Mengapa Bukan Pulau Terdepan?”, *Kompas*, 8 September 2006. Lihat pula tanggapan Alex Retraubun, “Mengapa Bukan Pulau Terluar? *Kompas*, 19 September 2006.

²⁶ Penulis modifikasi dari konsep yang dikemukakan Marshall Sahlins, *The Islands of History*, Chicago, The University of Chicago Press, 1987 dalam disertasi “Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII-XVIII, Disertasi UI, 1999.

Sangihie-Talaud yang nyaris terlupakan (dilihat dari sudut pandang tempatan) dalam kurun waktu masuknya pedagang dari Iberia di sana.²⁷

METODOLOGI STRUKTURIS

Berakhirnya masa ‘modern awal’, Asia Tenggara mengalami kegagalan dalam kegiatan perdagangan dan peradaban yang digerakkan kapitalisme. Sejak itu masuk ke dalam orbit dunia yang dikembangkan Eropa. Mengenai kegagalan inilah yang menjadi persoalan metodologi mana yang cocok untuk menjelaskannya. Dalam dua buku Anthony Reid, yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, memberi penjelasan tentang kegagalan kapitalisme di Asia Tenggara. Anthony Reid menerangkan kegagalan kapitalisme Asia Tenggara karena faktor keunggulan VOC, baik dalam arti manajemen maupun kekuatan persenjataannya. Dengan kedatangan kapal-kapal Belanda maka neraca perdagangan di Asia Tenggara merosot di sekitar tahun 1600.

Reid dalam menjelaskan kegagalan itu dengan menunjukkan struktur sosial. Struktur sosial di Asia Tenggara memperlihatkan misalnya perbudakan dan ketergantungan hirarkis warganya seperti terlihat antara kota-kota pelabuhan yang masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan para raja. Para raja tidak melakukan akumulasi modal sebagaimana di Eropa. Struktur sosial juga tidak menjamin para pedagang atas hak milik yang bergerak dan tidak bergerak karena sewaktu-waktu dapat disita oleh raja. Kekayaan para pedagang hanya disalurkan untuk membeli budak sebanyak-banyaknya atau memelihara rombongan pengikut yang besar.²⁸

Hal kedua yang tidak ditekankan Reid adalah bahwa sesungguhnya kemajuan di bidang pelayaran di pantai utara Jawa dan terjadi alih teknologi. Volume kapal layar bertambah dari 50 ton menjadi 300 ton dan telah terjadi perkembangan ekonomi wilayah pesisir utara Jawa dalam abad ke-18. Leirissa mengemukakan argumentasinya dengan menyebut karya Gerrit Knapp²⁹ dan Luc Nagtegaal³⁰.

²⁷ Alex J. Ulaen, *Nusa Utara Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*, Pustaka Sinar Harapan, 2003.

²⁸ Lihat R.Z. Leirissa, “Peradaban dan Kapitalisme di Asia Tenggara” kata Pengantar untuk buku Anthony Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, (terj. LP3ES, 2004: xxi-xxii).

²⁹ Gerrit J. Knaap, *Shallow Waters, Rising Tide* (Leiden, KITLV, 1996)

³⁰ Luc Nagtegaal, *Riding the Tiger: The Dutch East India Company and the Northeast Coast of Jaava, 1680-1743* (Leiden, KITLV, 1996)

Dalam perkembangan mutakhir tentang tema yang dibahas ini dapat diketahui dari karya Kwee Hui Kian.³¹ Dalam karya yang terbit sebagai serial monografi program TANAP, Kwee memperlihatkan peran penguasa pribumi Jawa dalam konstelasi interaksi dan persaingan EIC dan VOC. Dalam suatu informasi yang diperoleh dikatakan Panembahan Madura di Bangkalan menyatakan “*if there was a plot that the English attack from the sea and the sultan, who is also not very well-disposed to the Company, from the land, the Company would lose absolutely*”. Lebih lanjut ia menunjukkan adanya keseimbangan dalam memperoleh keuntungan dari penguasa di pesisir utara Timur Laut Jawa antara tahun 1740-an hingga pertengahan 1750-an. Di dalam interaksi dan kompetisi itu masing-masing pihak sepakat untuk “kue” yang mereka peroleh. Hanya yang mereka tidak puas adalah ukurannya.³²

Dengan pembuktian ini maka persoalannya bukan bukan terletak pada penggunaan sumber semata (arsip VOC/Kolonial), melainkan pada pendekatan atau metodologi. Kelemahan pendekatan struktural dalam hal ini adalah ketidakmampuannya untuk menjelaskan perubahan sosial. Kalau demikian sebuah tawaran metodologi alternatif perlu diajukan: metodologi strukturalis.³³ Pendekatan ini terutama memperlihatkan peran aktif anggota kelompok masyarakat dalam mengubah struktur sosial. Pendekatan sejarah seperti ini dapat menjelaskan bagaimana masyarakat pada masa lampau menghadapi perubahan.³⁴ Itu berarti pula dari pelajaran sejarah dapat untuk mengkaji masyarakat masa kini dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang.

Barang tentu kita memberi penghargaan tinggi kepada Braudel yang telah memberi kerangka (*structural*) dan landasan berpijak untuk memahami proses sejarah yang memperlihatkan terbentuknya satuan-satuan wilayah laut sebagai satuan integrative dan satuan analisis kajian. Tiga analisa dasar logika sejarah Braudel yang berharga

³¹ Kwee Hui Kian, *The Political Economy of Java's Northeast Coast, c. 1740-1800 Elite Synergy* (Leiden, 2006). *passim* 251-223.

³² “Towards an New Age of Partnership” adalah program pelatihan dan penelitian yang diberikan kepada sejumlah peserta dari negara yang memiliki hubungan sejarah dengan VOC, dibiayai oleh kementerian Luar Negeri, Pendidikan dan Kebudayaan Belanda, NWO, WOTRO dan Universitas Leiden.

³³ Christopher Lloyd, *The Structures of History* (Cambridge USA, Blackwell, 1993)

³⁴ R.Z. leirissa, “Peradaban dan Kapitalisme..” :xxiv.

dalama kajian sejarah adalah struktur (*structure*), waktu (*time*), dan tempat (*space*).³⁵ Aspek geografi dengan kata lain menjadi landasan penting untuk mengelaborasi pendekatan ini. Dengan tetap mengindahkan teori dan pendekatan Braudel diperlukan pengembangan metodologi strukturalis yang merupakan penyangga penulisan “Sejarah Total”. Berbagai dimensi sejarah dapat diliput secara komprehensif, termasuk misalnya sejarah “dari bawah” dan subaltern. Ini adalah suatu keniscayaan. Bukankah sejarah (dipelajari atau ditulis) bertolak dari sudut pandang? Penulis lalu teringat pula pada Ngugi wa Thiong’o, sastrawan dan intelektual terkemuka Kenya yang pernah mengatakan “*the question is from what base do we look at the world*”.³⁶

Dalam konteks ini pula kita perlu memberi ulasan tentang “historiografi Indonesiasentris”, yang diajukan Prof. Sartono Kartodirdjo di era tahun 1970-an. Sebenarnya Van Leur sudah mengusulkan juga untuk melihat sejarah (Indonesia) jangan dari “geladak-geladak kapal VOC”. Prof. Sartono mempersyaratkan pendekatan multidimensional yang menggunakan ilmu-ilmu sosial. Akan tetapi yang masih terlihat dari pengamatan Prof. Bambang Purwanto bahwa penulisan dengan “Indonesiasentrisme” seperti yang ditunjukkan mengenai periode VOC, tidak mampu menjelaskan sejarah yang tidak sederhana. Oleh karena itulah ia kemudian mengatakan “gagalnya historiografi Indonesiasentris?!”.³⁷

Tetapi apakah suatu “sudut pandang” bisa dikatakan gagal? Bukankah yang gagal adalah metodologinya? Sudah tentu yang dimaksud “gagal” adalah ketidakmampuan menjelaskan perubahan sosial, yang multidimensi. Menurut Prof. Bambang, dengan historiografi Indonesiasentris itu “menyederhanakan proses sejarah”. Lebih lanjut ia mengatakan

“berbagai kajian yang berlabel multidimensi itu pun masih tetap memfokuskan eksplanasi historis sejarah Indonesia di sekitar kolonialisme, sehingga menafikan bukti-bukti empirik tentang adanya independensi kausalitas [...] sejarah pada masa colonial tidak identik dengan kekuasaan kolonial, karena sejarah yang terjadi merupakan hasil dari interrelasi antar berbagai elemen yang ada pada waktu itu”.³⁸

³⁵ Fernand Braudel, *La Mediterranee et la Monde Mediterraneen a l' Epoque de Philippe II*, 1949 (second revised edition 1966).

³⁶ Ngugi wa Thiong’o, dikutip dari Beverly Southgate, *History What & Why: Ancient, Modern and Postmodern Perspectives* (London, Routledge, 1996:10)

³⁷ Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2006.

³⁸ Bambang Purwanto, *ibid*:16.

Pengungkapan sejarah dalam periode VOC, Prof. Bambang mengatakan jangan “hitam-putih”. Menurutnya ada empat fenomena yang harus digunakan: kompetisi dan konflik antara bangsa Barat; kompetisi dan konflik antara kerajaan-kerajaan lokal dengan bangsa barat; kompetisi dan konflik antara kerajaan-kerajaan lokal; dan konflik di dalam kerajaan lokal (hlm 132).

Taufik Abdullah sudah lebih dahulu mengajukan betapa tidak sederhananya sejarah hubungan kerajaan Nusantara dengan VOC. Ia mengemukakan adanya pola sekutu-seteru dalam hubungan VOC dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara.³⁹ Konstelasi antara Palembang, Jambi, Johor dan VOC dapat bertukar sebagai sekutu dan sekutu satu sama lain. Dengan pola itu, Susanto Zuhdi menunjukkan pola sekutu-seteru antara Kesultanan Butun dan VOC juga berjalan dalam abad ke-17 dan ke-18. VOC juga pernah bersekutu dengan Ternate untuk menghadapi Gowa. Bagi Butun, VOC adalah sekutu menghadapi Gowa dan Ternate. Itulah sebabnya ketika pada saat kondisi aman telah tercapai, disebut ‘*labu rope labu wana*’. Artinya “telah aman berlabuh haluan berlabuh buritan”. *Rope* (haluan) adalah kiasan untuk Gowa sedangkan *Wana* (buritan) adalah Ternate. Persekutuan Butun dengan VOC tidak selamanya juga. Ketika sultan La Karambau berani melanggar kontrak yang telah dibuat oleh pendahulunya, maka benteng Wolio diserang pasukan VOC pada tahun 1755. Seorang *sapati* (perdana menteri) tewas dan ratusan orang meninggal.⁴⁰ Yang menarik justru karena persekutuannya dengan VOC belangsung lebih lama, orang Butun mengalami stigma sebagai “pengkhianat”. Sangat boleh jadi itu adalah karena Sultan Hasanuddin dalam Indonesia merdeka kemudian adalah “Pahlawan Nasional”.

KESIMPULAN

Kini sejarah tidak cukup hanya ditulis dengan narativisme dengan monodisiplin, meskipun bukan berarti jenis ini tidak penting. Tulisan sejarah semacam itu boleh untuk skripsi strata satu. Tulisan Anthony Reid telah melandasi dan memberi kerangka penulisan “sejarah utuh”. Sebagai konsekuensi penggunaan pendekatan struktural maka kurang tampak (ditekankan) pengungkapan peran-peran individu dan kelompok

³⁹ Taufik Abdullah, “Kata Pengantar” dalam P. de Roo de Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, terj. Jakarta. Bhratara, 1971

⁴⁰ Susanto Zuhdi, *Labu Rope Labu Wana Sejarah Butun Abad XVII-XVIII*, Disertasi UI, 1999.

masyarakat dalam mengubah struktur. Ia menjelaskan kegagalan perdagangan dan kapitalisme Asia Tenggara, karena keunggulan VOC. Reid tidak mencari jawaban dari struktur-struktur sosial, sesuai dengan pendekatan struktural yang ia gunakan sendiri.

Karya-karya Knaap, Nagtegaal, dan yang mutakhir Kwee Hui Kian seperti telah diungkapkan di atas, menunjukkan peran aktif dan kemajuan ekonomi yang diperoleh dari sisi pribumi dalam masa ‘modern awal’. Kwee bahkan memperlihatkan kemampuan bupati Madura membaca konstelasi relasi antaranya dirinya, EIC dan VOC, untuk kepentingannya. Kalau demikian penjelasan strukturalis lebih relevan dan perlu didukung oleh analisis interdisiplin ilmu (ilmu-ilmu sosial dan humaniora). Interdisiplin yang dimaksud adalah keterkaitan dua atau lebih (disiplin) ilmu sebagai kerangka dan dasar menganalisis. Jadi dapat disebut ‘historiografi dengan pendekatan interdisiplin’.⁴¹ Lalu apakah ide yang dimaksud di atas itu sama dengan yang digulirkan oleh Prof. Shaharil Talib, ketika ia mengemukakan ‘*new historiography*’. Ide pokoknya adalah frasa yang dicantumkan di bagian atas makalah ini.

Ketika kini transisi antargenerasi sejarawan mungkin sudah pada tahap-tahap akhir (dari generasi Sartono Kartodirdjo), besar harapan kiranya Ilmu Sejarah di tanah-air ini semakin berkembang dalam teori, metodologi, dan penggalan sumber yang semakin beragam sehingga mampu memberi penafsiran dan/atau penjelasan terhadap masalah/isu sejarah yang polanya sering berulang. Proyek besar ini menuntut kerjasama dan dialog di kalangan sejarawan termasuk ilmuwan sosial dan humaniora lainnya.

⁴¹ Dari diskusi dengan Prof. R.Z. Leirissa, dapat diketahui bahwa dalam merancang Program Pascasarjana Ilmu Sejarah di UI, Prof. Harsja W. Bachtiar mengajukan gagasan penggunaan ‘pendekatan interdisiplin’. Untuk ini saya berterima kasih pada Pak Ris.